



Memaknai politik dalam dua matra A. A. Yewangoe: Suatu basis teologis bagi keterlibatan gereja dalam dunia politik di Indonesia

Alter Imanuel Wowor 

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, DKI Jakarta

Correspondence:

alterimanuel@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v9i3.804>

Article History

Submitted: Oct. 13, 2023

Reviewed: Dec. 11, 2023

Accepted: Dec. 26, 2023

Keywords:

A.A. Yewangoe;
church and politics;
church involvement in
politics;
church political policy;
gereja dan politik;
kebijakan politik gereja;
keterlibatan gereja
dalam politik

Copyright: ©2023, Authors.

License:



Scan this QR,
Read Online



Abstract: Discussions about political theology in Indonesia became increasingly popular after the reformation events. The pros and cons regarding the church's involvement in various political affairs seem to be a hot issue that continues to emerge in various political events in Indonesia. The lack of uniform attitudes and interpretations of the many churches in Indonesia regarding what politics is, how churches do politics, and the relationship between politics and the church makes this problem even more complicated. This research aims to produce a study that can be used as a reference or on a theological basis regarding the issue of church involvement in politics in the Indonesian context based on a review of Andreas Anangguru Yewangoe's thoughts. The research method used in this research is descriptive analysis with a literature study approach. The thesis is that the church's involvement in politics is a response to a divine call and is not facultative. The Gospel is an "entry point" or basis for the church's political involvement. Thus, politics should not be considered taboo, dirty, or foreign to the Christian community.

Abstrak: Pembicaraan mengenai teologi politik di Indonesia semakin ramai pascaperistiwa reformasi. Sikap pro-kontra terkait keterlibatan gereja dalam berbagai urusan politik seakan menjadi isu hangat yang terus muncul dalam berbagai peristiwa politik yang terjadi di Indonesia. Tidak adanya kesamaan sikap dan tafsiran dari banyaknya gereja-gereja di Indonesia terhadap apa itu politik, bagaimana gereja berpolitik, serta apa hubungan antara politik dengan gereja menjadikan permasalahan ini menjadi semakin rumit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu kajian yang bisa dijadikan referensi atau basis teologis berkaitan dengan isu keterlibatan gereja dalam dunia politik pada konteks Indonesia berdasarkan ulasan atas pemikiran Andreas Anangguru Yewangoe. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Artikel ini mengajukan tesis bahwa keterlibatan gereja dalam dunia politik merupakan suatu tanggapan atas panggilan ilahi, dan bukanlah sesuatu yang fakultatif sifatnya. Injil merupakan salah sebuah "entry point" atau basis dari keterlibatan gereja dalam dunia politik. Dengan demikian, politik tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang tabu, kotor, atau asing bagi komunitas umat Kristen.

Pendahuluan

Saat ini politik bukanlah sesuatu hal yang tabu dan asing di Indonesia. Sikap apatis dan skeptis terhadap dunia politik perlahan-lahan mulai luntur. Sejak peristiwa pada bulan Mei

tahun 1998, yang dikenal dengan peristiwa reformasi, pembicaraan mengenai dinamika politik di Indonesia secara berangsur mulai menjadi sesuatu yang familiar di semua lapisan dan kalangan masyarakat. Pada satu sisi, peristiwa reformasi memang membawa angin segar bagi bangsa Indonesia sebagai sesuatu yang mengondisikan hak asasi manusia, emansipasi hukum, dan struktur sosial yang egaliter menjadi nilai yang harus diperjuangkan perwujudannya. Namun, pada sisi lainnya, Indonesia mendapat tantangan dari realitas “kemerdekaan” yang menjadi sulit untuk dikendalikan. Peristiwa reformasi seakan membuka jalan bagi suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya, khususnya dalam dinamika dan kontestasi politik.

Dalam pusaran dinamika politik di Indonesia, tentu saja umat Kristen atau gereja bukanlah suatu entitas asing dalam suatu negara. Tradisi Pietisme gereja yang anti-sosial dan anti-politik sepertinya sudah tidak relevan lagi dalam konteks Indonesia yang memasuki dan menjalani masa transisi politiknya pasca-orde baru. Konsekuensi dari peristiwa reformasi tentu saja tidak hanya berdampak dalam kehidupan sosial-masyarakat, tetapi juga sampai ke dalam lingkup gereja. Gereja-gereja di Indonesia menjadi salah satu lembaga yang cukup vokal untuk menyoroti berbagai isu yang terjadi dalam dinamika politik negara, baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal-daerah (sesuai konteks di mana sinode atau gereja itu berpijak). Sebagai contoh dalam skala nasional, lembaga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) selalu menyampaikan seruan atau surat pengembalaan kepada gereja-gereja yang bernaung di dalamnya terkait pemilihan umum legislatif, kepala negara, bahkan kepala daerah.¹ PGI juga sering mengeluarkan pernyataan sikap terkait dinamika politik yang terjadi dalam skala nasional, misalnya menanggapi pernyataan Kapolri bahwa rumah tidak boleh dijadikan tempat ibadah,² penonaktifan 75 pegawai KPK,³ Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Agama,⁴ RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP),⁵ izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah,⁶ pembubaran ibadah,⁷ dan lain sebagainya. Pada tahun 2014,

¹ Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). <https://pgi.or.id/wp-content/uploads/2020/10/PESAN-PASTORAL-PGI-MENGHADAPI-PILKADA-2020.pdf> (diakses 12 September 2023); Ardito Ramadhan dan Icha Rastika. “PGI Ingatkan Gereja Tak Jadi Panggung Kampanye pada Perayaan Natal.” *KOMPAS.com*, 19 Desember 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/17202461/pgi-ingatkan-gereja-tak-jadi-panggung-kampanye-pada-perayaan-natal> (diakses 21 Desember 2023); Prayogo. “Isi Lengkap Pesan Natal KWI-PGI Tahun 2023, Singgung Pemilu 2024.” *KalderaNews*, 16 November 2023, <https://www.kalderanews.com/2023/11/16/isi-lengkap-pesan-natal-kwi-pgi-tahun-2023-singgung-pemilu-2024/> (diakses 2 Desember 2023); Faisal Aristama. “Jelang Natal, Ketum PGI Imbau Gereja Tidak Terlibat Politik Praktis Pemilu 2024.” *RMOL.ID*, 19 Desember 2023, <https://politik.rmolid.com/read/2023/12/19/602023/jelang-natal-ketum-pgi-imbau-gereja-tidak-terlibat-politik-praktis-pemilu-2024> (diakses 20 Desember 2023).

² Eri Komar Sinaga. “PGI Surati Kapolri Protes Larangan Rumah Hunian Dijadikan Tempat Ibadah.” *Tribunnews.com*, 4 Juni 2014, <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/04/pgi-surati-kapolri-protos-larangan-rumah-hunian-dijadikan-tempat-ibadah> (diakses 8 September 2023).

³ Tsarina Maharani dan Kristian Erdianto. “PGI: Kami Menentang Semua Upaya Pelemahan KPK.” *Kompas.com*, 31 Mei 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/05000051/pgi--kami-menentang-semua-upaya-pelemahan-kpk?page=all> (diakses 8 September 2023).

⁴ Jabbar Ramdhani. “PGI Keberatan atas 2 Pasal di RUU Pesantren dan Pendidikan Agama.” *Detiknews*, 24 Oktober 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4270559/pgi-keberatan-atas-2-pasal-di-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama> (diakses 8 September 2023).

⁵ Fuji Permana. “PGI Tanggapi Polemik RUU HIP.” *Republika*, 17 Juni 2020, <https://khazanah.republika.co.id/berita/qc24qi366/pgi-tanggapi-polemik-ruu-hip> (diakses 8 September 2023).

⁶ Herianto Batubara. “Persekutuan Gereja Indonesia: Sulit Dapat IMB, Banyak Penutupan Rumah Ibadah.” *Detiknews*, 19 Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6523930/persekutuan-gereja-indonesia-sulit-dapat-imb-banyak-penutupan-rumah-ibadah> (diakses 8 September 2023).

⁷ Julnis Firmasyah. “PGI Menyayangkan Pembubaran Paksa Ibadah Gereja Masih Terjadi Setelah Jokowi Kritis Larangan Ini.” *Tempo.co*, 31 Mei 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1731745/pgi-menyayangkan-pembubaran-paksa-ibadah-gereja-masih-terjadi-setelah-jokowi-kritis-larangan-ini> (diakses 8 September 2023);

pengurus pusat Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia (PGPI) mengeluarkan surat dukungan kepada salah satu calon presiden.⁸ Isu ini membawa keresahan dalam komunitas Kristen pada saat itu, bahkan secara khusus di dalam tubuh PGPI sendiri. Selain itu, adanya aktivitas politik praktis yang dilakukan oleh pendeta juga mendatangkan kontroversi di dalam komunitas Kristen.⁹ Sejumlah keterlibatan itu menunjukkan bahwa gereja-gereja tidak absen dari kehidupan politik yang terjadi di Indonesia.

Dalam skala lokal (daerah), Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) merupakan salah satu sinode gereja yang sering menyampaikan seruan atau penggembalaan kepada warganya terkait anjuran sebagai warga gereja dalam keikutsertaan dalam momentum politik. GMIM banyak mengeluarkan pernyataan terkait permasalahan politik yang terjadi di sekitarnya, misalnya jabatan gerejawi (Penatua - Pnt, Pendeta – Pdt., dll) tidak boleh dicantumkan dalam atribut kampanye,¹⁰ pendeta tidak boleh berpolitik,¹¹ himbuan agar tidak golput dalam pemilu,¹² dan lain sebagainya. Selain GMIM, Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat (GPIB) juga merupakan dua sinode gereja yang sering

Tim detiknews. "Kecaman PGI atas Aksi Pembubaran Paksa Jemaat Gereja di Binjai saat Beribadah." *Detiksumut*, 1 Juni 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6749544/kecamatan-pgi-atas-aksi-pembubaran-paksa-jemaat-gereja-di-binjai-saat-beribadah> (diakses 8 September 2023); Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). <https://pgi.or.id/pgi-mengecam-tindakan-pembubaran-ibadah-keluarga-jemaat-gbi-sola-gratia-padang-disertai-ancaman-pembunuhan/> (diakses 8 september 2023).

⁸ Kuncoro Adi. "Pdt. Jacob Nahuway Menggiring Organisasi Gereja ke Politik Praktis." *Kompasiana*, 12 Juni 2014, <https://www.kompasiana.com/69kuncoroadi/54f70506a33311322e8b4578/pdtjacob-nahuway-menggiring-organisasi-gereja-ke-politik-praktis> (diakses 8 September 2023); Bernat Ndawu. "Surat Terbuka untuk Pdt Dr. Jacob Nahuway." *Kompasiana*, 20 Juni 2014, https://www.kompasiana.com/bern_ndawu75/54f6ec72a333114e5d8b4da5/surat-terbuka-untuk-pdt-drjacob-nahuway (diakses 8 September 2023).

⁹ Royandi Hutasoit. "Pendeta Gilbert: Ganjar Pranowo Simbol Toleransi & Bersih dari Politik Identitas." *Okenews*, 29 Oktober 2023, <https://nasional.okezone.com/read/2023/10/29/337/2910448/pendeta-gilbert-ganjar-pranowo-simbol-toleransi-bersih-dari-politik-identitas> (diakses 12 November 2023); Juni Armanto. "Inilah Harapan Para Pendeta Jika Anies Jadi Presiden di Pilpres 2024." *Indopos.co.id*, 16 September 2023, <https://www.indopos.co.id/politik/2023/09/16/inilah-harapan-para-pendeta-jika-anies-jadi-presiden-di-pilpres-2024/> (diakses 28 September 2023); Andika Dwi. "Daftar Lengkap Timnas AMIN, Ada Sutiyoso hingga Japto." *Tempo.co*, 22 November 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1800033/daftar-lengkap-timnas-amin-ada-sutiyoso-hingga-japto> (diakses 2 Desember 2023); Yohanes Liesty Poerwoto. "Anies Baswedan Umumkan Susunan Timnas AMIN, 5 Pendeta Jadi Dewan Penasehat." *TribunToraja.com*, 21 November 2023, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/anies-baswedan-umumkan-susunan-timnas-amin-5-pendeta-jadi-dewan-penasehat/ar-AA1khS6T> (diakses 2 Desember 2023); Budhi Marpaung. "Ada Pendet yang Masuk Daftar Calon Sementara Anggota DPR Pemilu 2019, Ini Lho Namanya." *Jawaban*, 14 Agustus 2018, https://www.jawaban.com/read/article/id/2018/08/14%2010:00:00/91/180813170125/ada_pendeta_yang_masuk_daftar_calon_sementara_anggota_dpr_pemilu_2019ini_lho_namanya (diakses 8 September 2023); Kris Mada. "Pendeta Jadi Caleg PKS." *Kompas.com*, 22 April 2013, <https://tekno.kompas.com/read/2013/04/22/14591738/~Nasional> (diakses 8 September 2023).

¹⁰ Lodie Tombeg. "Baliho Caleg Tak Boleh Cantumkan Gelar Pendeta," *Tribun Tomohon*, 29 Maret 2014, <https://manado.tribunnews.com/2014/03/29/baliho-caleg-tak-boleh-cantumkan-gelar-pendeta> (diakses 8 September 2023).

¹¹ Recky Pelealu, "Pendeta Berpolitik? Sumakul: Sekarang Tidak Bisa," *BeritaManado.Com*, 28 Maret 2014, <https://beritamanado.com/pendeta-berpolitik-sumakul-sekarang-tidak-bisa> (diakses 8 September 2023).

¹² Arthur Rompis, "Hein Arina Minta Warga GMIM Jangan Golput," *Tribunmanado.Co.Id*, 7 April 2019, <https://manado.tribunnews.com/2019/04/07/hein-arina-minta-warga-gmim-jangan-golput> (diakses 8 September 2023); Jeffry Pay. "Ini 7 Seruan Surat Pastoral GMIM Soal Pemilu Serentak 2024." *Cahaya Manado*, 28 November 2023, <https://cahayamanado.com/nasional/ini-7-seruan-surat-pastoral-gmim-soal-pemilu-serentak-2024/> (diakses 2 Desember 2023).

mengeluarkan pernyataan sikap atau seruan menyikapi isu politik yang terjadi.¹³ Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa masing-masing sinode gereja yang ada di Indonesia tentu saja memiliki sikap dan pesan penggembalaannya yang khusus disampaikan kepada warganya dalam rangka keterlibatannya dalam setiap momentum politik di negara ini. Jenis keterlibatan dan sikap gereja-gereja yang variatif dalam berbagai urusan serta peristiwa politik yang terjadi di Indonesia, baik dalam skala nasional ataupun lokal/daerah, berpotensi menimbulkan kontroversi dalam lingkup komunitas gereja-gereja di Indonesia sendiri. Pro-kontra terhadap keterlibatan gereja dalam berbagai urusan politik seakan menjadi isu hangat yang terus muncul dalam berbagai peristiwa politik negara. Tidak adanya kesamaan sikap dan tafsiran dari banyaknya gereja-gereja di Indonesia terhadap apa itu politik, bagaimana gereja berpolitik, serta apa hubungan antara politik dengan gereja menjadikan permasalahan ini menjadi semakin rumit.

Berdasarkan uraian pengantar di atas, artikel ini hendak menawarkan suatu perspektif tentang politik dari sudut pandang teologi Kristen yang mengacu pada pemikiran teolog Indonesia, Andreas Anangguru Yewangoe. Menurut hemat saya, pemikiran Yewangoe bisa menjadi acuan sekaligus representasi tentang bagaimana pandangan teologi Kristen di Indonesia memaknai politik, khususnya dalam menghadapi pesta demokrasi ber-kala, yang membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam pemilihan kepala negara, kepala daerah, maupun anggota dewan perwakilan rakyat di semua tingkatan. Saya menemukan ada tiga penelitian yang muncul atau terbit dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang membahas topik yang berkaitan dengan relasi antara politik dan gereja di Indonesia.¹⁴ Namun menurut hemat saya, ketiga penelitian tersebut belum cukup komprehensif untuk membahas tentang sejumlah aspek keterlibatan gereja sebagai suatu panggilan iman. Berdasarkan hasil eksplorasi saya terhadap pemikiran Yewangoe, saya menemukan sejumlah hal yang berkaitan dengan topik keterlibatan gereja dalam dunia politik, yaitu antara lain politik yang diartikan dalam arti dua matra, prinsip keterlibatan gereja, visi politik umat Kristen, penilaian atas sistem pemerintah demokrasi, penegasan bahwa gereja bukan penumpang gelap atau entitas asing di dalam *polis* Indonesia, dwi-kewarganegaraan, peran pendeta dalam politik, dan lain sebagainya. Pembahasan terkait salah satu atau sejumlah hal ini kadang tidak bisa kita temui dalam pemikiran atau penelitian teolog Indonesia lainnya, misalnya saja tiga penelitian yang saya singgung sebelumnya. Dengan demikian, saya hendak menegaskan bahwa pemikiran Yewangoe merupakan salah satu referensi yang komprehensif untuk dijadikan landasan ketika membahas topik seputar keterlibatan gereja dalam dunia politik dalam konteks Indonesia.

Tesis penelitian ini adalah, keterlibatan gereja dalam dunia politik merupakan suatu tanggapan atas panggilan ilahi dan bukanlah sesuatu yang fakultatif. Politik tidak boleh dimaknai sebagai sesuatu yang kotor, asing, atau tabu bagi gereja. Untuk membuktikan tesis

¹³ Arcus GPIB. <https://arcusgpiib.com/arahan-ms-gpiib-sikapi-kontestasi-2024-tahan-diri-jangan-mengatasnamakan-gpiib/> (diakses 2 Desember 2023); Hermina Pello. "Ini Suara Gembala MS GMIT Terkait Pemilu 2019." *Pos-Kupang.com*, 1 April 2019, <https://kupang.tribunnews.com/2019/04/01/ini-suara-gembala-ms-gmit-terkait-pemilu-2019?page=all>; <https://gpiib.or.id/pesan-ms-gpiib-pada-hut-ke-69-gerakan-pemuda/> (diakses 2 Desember 2023); Arcus GPIB. <https://arcusgpiib.com/menghadapi-pemilu-2024-perlu-pendidikan-politik-bagi-warga-gereja/> (diakses 2 Desember 2023).

¹⁴ Jordan Pakpahan, "Politik keadilan: Peran politik gereja di masa kini," *Loko Kada 2*, no. 2 (September 2022): 92–101; Grets Janialdi Apner, "Kehadiran Kristiani dalam politik: Rekonstruksi teologi misi tentang peran Kekristenan dalam ruang publik politis di Indonesia," *Diegesis 6*, no. 2 (Agustus 2021): 1–23; Hasahatan Hutahaean, "Teologi politik gereja: Menemukan dan memancarkan tritugas gereja dalam pilkada dan pilpres," *Melo 1*, no. 1 (Juni 2021): 1–17.

yang saya tawarkan, saya menggunakan metode penelitian kualitatif, secara khusus lewat pendekatan studi pustaka. Lebih jelasnya, artikel ini merupakan suatu bentuk hasil penelitian eksploratif atas pemikiran Yewangoe, yang dikerjakan lewat bantuan studi pustaka dan cenderung berwatak deskriptif. Dengan adanya kupasan pemikiran Yewangoe lewat artikel ini, para pimpinan gereja maupun juga masyarakat Kristen di Indonesia bisa memiliki referensi teologis yang bernas dan komprehensif untuk bisa dijadikan basis dalam rangka memaknai apa itu politik dari sudut pandang ajaran atau iman Kristen, bagaimana relasi antara gereja dan politik, serta bagaimana keterlibatan gereja atau umat Kristen dalam politik. Inilah tujuan dari dikerjakannya penelitian ini. Selain itu, alasan dilakukannya penelitian ini karena sejauh ini saya belum menemukan adanya tulisan, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun buku, yang secara khusus membahas pemikiran teologis tentang politik dari sudut pandang seorang teolog Indonesia. Saya akan menguraikan bangunan penelitian ini dalam beberapa bagian: dua matra politik; gereja dan politik; pendeta dan politik; kontribusi pemikiran Yewangoe; dan kritik atas pemikiran Yewangoe, yang sekaligus sebagai tawaran dari penelitian ini. Artikel ini akan sangat bermanfaat dan dapat menjadi panduan (pertimbangan), secara khusus bagi para pimpinan gereja dan seluruh umat Kristen di Indonesia, mengingat dalam waktu dekat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakilnya, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta anggota DPD RI secara serentak pada 14 Pebruari 2024.

Dua Matra Politik

Menurut Yewangoe, peran seseorang dalam politik dapat dibedakan menjadi dua matra yang tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya. Matra pertama adalah tanggung jawab sebagai warga negara yang hidup dalam suatu masyarakat atau negara (*polis*).¹⁵ *Polis* adalah istilah Yunani yang mengacu pada tempat di mana kehidupan bersama dapat dibina dan dipupuk, tetapi berarti pula suasana di mana setiap orang yang berkehendak baik dapat saling membina dan membangun dirinya masing-masing bagi kesejahteraan *polis* itu sendiri.¹⁶ Secara sederhana, dalam pengertian ini, politik adalah kemauan bersama untuk membangun dan memelihara *polis*.

Lewat persepektif tersebut, politik tidak dilihat sebagai suatu kenyataan demonis, tetapi dipandang sebagai kenyataan manusiawi. Kehadiran pemerintah dibutuhkan untuk meniadakan hal-hal yang bersifat demonis, dan hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹⁷ Tujuan *polis* juga adalah untuk menjamin masyarakat mendapatkan kebahagiaannya. Keterlibatan orang Kristen bukan hanya sebagai ketaatan, tetapi karena adanya tanggung jawab pribadi dalam mempertahankan tata kehidupan masyarakat.¹⁸ Alasan atas tanggung jawab tersebut didasari pada Yeremia 29:7, "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu (LAI TB)." Salah satu bentuk upaya untuk mengusahakan kesejahteraan kota adalah lewat mempertahankan tata kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Yewangoe, keterlibatan orang Kristen dalam politik bukanlah sesuatu yang fakultatif,

¹⁵ Andreas A Yewangoe dan Wenata Sairin, *Suara-suara menyeruak udara: Serpihan-serpihan pemikiran dipusaran kehidupan kekinian* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 95.

¹⁶ Andreas A Yewangoe, *Agama dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia., 2001), 162.

¹⁷ *Ibid.*, 164.

¹⁸ *Ibid.*, 166.

melainkan sebuah panggilan.¹⁹ Untuk matra politik yang kedua, Yewangoe menjelaskannya sebagai berikut:

Matra lain dari politik adalah upaya-upaya untuk memperoleh kekuasaan (*power, macht*). Ada perjuangan memperoleh kekuasaan (*machtstrijd*). Kekuasaan bukanlah sesuatu yang buruk, asal saja dipergunakan untuk kemaslahatan bersama. Kekuasaan bukanlah tujuan pada dirinya, melainkan sarana untuk menghasilkan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Seorang Kristen yang mau memperoleh kekuasaan boleh saja mengusahakannya, tetapi tentu saja dengan mempergunakan lembaga-lembaga politik yang ada untuk menyalurkan hasratnya seperti partai politik.²⁰

Matra yang kedua didasarkan pada ajakan rasul Paulus kepada umat di kota Roma untuk taat kepada pemerintah sebagai suatu sikap politik. Matra ini hendak menjelaskan bahwa kekuasaan yang terwujud dalam bentuk pemerintah bukanlah sesuatu yang jahat. Bagi Paulus, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah (Roma 13); bisa juga dibandingkan dengan perintah Yesus dalam Matius 22:15-22. Pemerintah dianggap sebagai pengemban amanat untuk mengurus *polis* (negara-kota).²¹

Gereja dan Politik

Injil merupakan *entry point* (titik masuk) bagi keterlibatan gereja dalam berbagai urusan politik, baik gereja dalam artian institusi atau lembaga, tetapi juga gereja yang berarti orang Kristen secara perseorangan sebagai anggota tubuh Kristus. Injil (*euangelion*) adalah kabar baik yang mesti disampaikan kepada segala makhluk.²² Inti pemberitaan Injil adalah keselamatan yang dianugerahkan Allah. Keselamatan haruslah dimaknai bukan saja membawa “kesejahteraan” bagi manusia pada saat ia meninggal dunia, tetapi juga bermanfaat dan membawa berkat bagi kehidupan manusia sekarang ini.²³

Injil harus dimaknai sebagai berita keadilan dan perdamaian yang perlu diberitakan dan diupayakan di tengah-tengah situasi ketidakadilan dan ketidak-damaian. Injil mesti sangat kongkret di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengubah nasib seseorang dari keter tindasan kepada kemerdekaan.²⁴ Kabar baik yang diberitakan itu mestilah sungguh-sungguh kabar baik, tidak boleh berubah menjadi kabar buruk bagi para pendengarnya.²⁵ Yang ingin dipertegas dalam paradigma ini adalah kabar baik tidak hanya perlu untuk disampaikan, tetapi juga perlu diusahakan perwujudannya. Esensi dari keterlibatan gereja dalam urusan politik adalah menyatakan citra Allah yang peduli, simpatik, dan prihatin akan nasib manusia – sebuah citra Allah yang lebih bersahabat.²⁶

¹⁹ Ibid., 162.

²⁰ Yewangoe dan Sairin, *Suara-suara menyeruak udara: Serpihan-serpihan pemikiran dipusaran kehidupan kekinian*, 96.

²¹ Andreas A Yewangoe, “Visi Kristen Mengenai Politik,” in *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*, eds., Zakaria J. Ngelow (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013), 92.

²² Yewangoe dan Sairin, *Suara-suara menyeruak udara: Serpihan-serpihan pemikiran dipusaran kehidupan kekinian*, 25.

²³ Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, 2–3.

²⁴ Yewangoe dan Sairin, *Suara-suara menyeruak udara: Serpihan-serpihan pemikiran dipusaran kehidupan kekinian*, 26.

²⁵ Yewangoe dan Sairin, 27.

²⁶ Andreas A Yewangoe, *Theologia Crucis di Asia: Pandangan-Pandangan Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan Dalam Kemiskinan Dan Keberagaman Di Asia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), 345.

Ketika gereja sungguh-sungguh melaksanakan tugas pelayanan dan kesaksiannya, maka pada saat itulah gereja telah menjalankan tugas politiknya.²⁷ Dengan mengutip perkataan Karl Barth, “bukan dengan melakukan politik, tetapi dengan menjadi gereja, gereja telah melakukan politik,” Yewangoe setuju bahwa gereja harus sungguh-sungguh menjadi gereja yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi semua orang. Inilah tugas politik gereja yang harus dilaksanakannya dengan baik.²⁸

Gereja sebagai lembaga tetap mempunyai tanggung jawab politik, di samping sikap pribadi umat Kristen yang memiliki kompetensi dan berminat untuk berkecimpung dalam politik (praktis).²⁹ Lembaga gereja memiliki peran untuk menyuarakan seruan moral dalam rangka mengawal pemerintahan dan kemasyarakatan agar tidak diselewengkan. Gereja tidak boleh diidentikkan dengan partai politik, agar tidak dicap sebagai partisan. Artinya, lembaga gereja tidak boleh berafiliasi dengan partai politik maupun sayap partai politik. Suara gereja hanya bisa didengarkan apabila gereja bisa menjaga jarak dan tidak mempunyai kepentingan politik praktis. Dalam urusan politik, gereja harus bisa menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara.³⁰ Menyuarakan suara kenabian dan melaksanakan pendidikan politik bagi warga gereja adalah tanggung jawab politik gereja sebagai suatu lembaga.

Dalam rangka keterlibatan gereja atau orang Kristen dalam dunia politik (praktis), gereja atau orang Kristen harus memiliki prinsip-prinsip yang perlu dipegang agar supaya tidak terlena dalam kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pertama, kekuasaan yang dimiliki adalah kekuasaan yang melayani, bukan kekuasaan demi kekuasaan. Kedua, yang diperjuangkan adalah kesejahteraan bersama, bukan sekedar kesejahteraan sendiri yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan salah paham di dalam masyarakat. Ketiga, dalam penyelenggaraan kekuasaan, mestinya etika dan moral kekuasaan dikedepankan. Perlu ada keseimbangan antara kekuasaan (*power*), keadilan (*justice*), dan kasih (*love*). Kuasa tanpa keadilan adalah sewenang-wenang. Keadilan tanpa kekuasaan, tidak mungkin dicapai. Kasih adalah etika dasar, yang juga mengarahkan kekuasaan. Jadi, kekuasaan yang diarahkan oleh kasih tidak mungkin mengarah pada kepentingan diri sendiri, sebaliknya kekuasaan itu akan selalu mengarah pada kepentingan bersama. Keempat, dengarkanlah selalu suara hati yang benar. Kompromi politik mungkin tidak terhindarkan tapi ada batasnya. Apabila kompromi-kompromi itu telah menyentuh hal yang paling prinsip dalam iman Kristen, maka “adalah lebih baik taat kepada Allah ketimbang kepada manusia” (Kis. 5:29).³¹

Selain prinsip keterlibatan gereja dan orang Kristen secara pribadi dalam urusan politik praktis, Yewangoe juga menegaskan bahwa gereja harus memiliki sikap dan tidak boleh melupakan tugas pastoralnya dalam menyikapi keterlibatannya dalam aktivitas politik. Gereja tidak boleh berhenti menjalankan fungsi atau pelayanan pastoralnya terhadap anggota atau umatnya yang berkecimpung dalam dunia politik (praktis). Artinya, gereja tidak boleh membiarkan para politisi Kristen berjalan dan berjuang sendirian dalam arena politik praktis. Lebih daripada itu, gereja tidak boleh mengidentikkan diri dengan atau sebagai partai politik.

²⁷ Andreas A Yewangoe, *Tidak Ada Ghetto: Gereja di Dalam Dunia* (Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI & BPK Gunung Mulia, 2009), 11.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, 12.

³⁰ *Ibid.*, 11.

³¹ Andreas A Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa* (Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI & BPK Gunung Mulia, 2009), 224–225.

Gereja adalah suatu institusi yang mengatasi semua partai politik. Dalam “pengambilan jarak” yang demikian, maka gereja memiliki kekuatan moral.³²

Relasi antara gereja dan negara sangat sulit dirumuskan dengan pasti, apalagi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu negara ini terdiri dari masyarakat yang majemuk, dan jumlah umat Kristen yang sangat sedikit jika dibandingkan jumlah umat Muslim yang mengenal prinsip *din wa daulah*. *Din wa daulah* berarti agama dan negara adalah satu. Karena itu, Yewangoe melihat kesulitan untuk merumuskan hubungan antara agama (gereja) dan negara. Apabila keduanya benar-benar dipisahkan, dalam artian keduanya tidak saling mengintervensi, maka kelemahannya adalah kedua entitas tersebut saling terasing satu dengan yang lain.³³ Dalam konteks seperti itu, maka negara dengan mudah dicap telah terjerumus ke dalam sekularisme, sedangkan agama dianggap tidak peka sosial atau tidak ada sangkut-pautnya dengan permasalahan kongkret manusia (masyarakat).³⁴ Apabila kedua entitas tersebut tidak dipisahkan, maka kecenderungan untuk saling menyubordinasi sulit dihindari. Di samping itu, pemerintah atau pemimpin negara merasa memiliki kekuasaan yang absolut karena merasa mendapat mandat dan legitimasi ilahi dari Allah lewat perantara agama, sehingga kontrol terhadap kekuasaan menjadi tidak diperlukan atau lebih tepat dianggap pelecehan.³⁵

Relasi yang lebih baik meskipun juga tidak sempurna adalah gereja dan negara berdiri terpisah, dengan tugasnya masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan umat manusia.³⁶ Gereja dan negara berada pada posisi yang setara dalam kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi sebanyak mungkin manusia. Kedua entitas tersebut menjalankan fungsinya dalam dunianya masing-masing, akan tetapi keduanya bisa saling mengontrol dan mengkritisi satu dengan yang lain dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas kedua entitas tersebut.³⁷

Dalam rangka mendukung terwujudnya keadilan dan kesejahteraan manusia, gereja memilih sistem demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang egaliter. Sekalipun tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna, tetapi menurut Yewangoe, Kekristenan lebih mendukung demokrasi dibandingkan dengan berbagai sistem pemerintahan lainnya (monarki, oligarki, dll.).³⁸ Lewat demokrasi, keterlibatan seluruh elemen negara (termasuk gereja) terbuka lebar untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadaban (*civil society*).³⁹ Selain itu, Yewangoe menyatakan bahwa pada tingkatan tertentu, gereja bisa saja terlibat secara penuh dan aktif dalam politik praktis apabila berada dalam situasi yang kritis. Pilihan ini bisa diambil ketika instrumen-instrumen politik yang ada sudah menjadi lumpuh, serta adanya penyelewengan yang sudah tidak dapat ditoleransi menurut prinsip-prinsip iman Kristen.⁴⁰ Bahkan gereja atau umat Kristen bisa juga menginisiasi gerakan *civil disobedience* apabila semua cara dan ruang telah tertutup untuk bisa mempertanyakan, mempengaruhi, menentu-

³² Ibid.

³³ Andreas A Yewangoe, *Tidak ada negara agama: Satu nusa, satu bangsa* (Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI & BPK Gunung Mulia, 2009), 27.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Andreas A Yewangoe, “Hubungan Gereja dan Negara di Indonesia,” in *Ecclesia Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan Mengenai Calvin dan Calvinisme*, ed. Agustinus M.L Batlajery and Thomas Van den End (Jakarta: Gunung Mulia, n.d.), 186.

³⁷ Yewangoe, *Tidak ada negara agama: Satu nusa, satu bangsa*, 28.

³⁸ Ibid., 122–123.

³⁹ Ibid., 124.

⁴⁰ Yewangoe, *Tidak ada ghetto: Gereja di dalam dunia*, 14.

kan, atau menolak suatu kebijakan atau peraturan yang akan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah.⁴¹

Umat Kristen perlu memiliki kesatuan visi politik. Namun, persatuan visi itu menjadi tidak wajar apabila berdasarkan atas perasaan terancam.⁴² Setidaknya ada empat visi bersama orang Kristen terhadap politik yang dikemukakan oleh Yewangoe,⁴³ yaitu: Pertama, beriman kepada Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan atas sejarah. Yesus memiliki segala kekuasaan baik di bumi maupun di surga. Dengan demikian, orang-orang Kristen yang berkecimpung dalam dunia politik terpanggil untuk ikut mengarahkan sejarah termasuk sejarah bangsa.

Kedua, dunia politik adalah arena terjadinya pertemuan antara kemanusiaan dan Allah. Tugas politisi Kristen adalah terus berusaha dan peka untuk mengetahui kapan dan dalam bentuk apa “pertemuan” itu terjadi. Visi politik Kristen adalah memperjuangkan keadilan di tengah ketidakadilan, meringankan penderitaan kemiskinan, dan lain sebagainya. Konsitusi atau undang-undang yang dirumuskan haruslah berpihak kepada masyarakat yang menderita.

Ketiga, politisi Kristen harus mampu menerjemahkan dan mewujudkan nyatakan Allah yang mengasihi dunia. Yang berarti juga umat Kristen harus mengasihi setiap orang Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, etnis, apalagi kepentingan pribadi. Keempat, tantangan politik tertinggi: apakah kekuasaan politik hendak digunakan untuk hal-hal yang baik atau demi kepentingan pribadi dan golongan.

Grand program yang dicatat dalam Lukas 4:18-19, “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang,” merupakan salah satu kunci utama perspektif teologi Kristen dalam rangka menegaskan keterlibatan umat Kristen dalam dunia politik dan permasalahan sosial.⁴⁴ Teks itu menceritakan tentang nubuatan nabi Yesaya yang digenapi oleh Yesus pada saat ia mengajar dalam rumah ibadat di Nazaret. Berdasarkan *grand program* dan empat visi yang diuraikan sebelumnya, Yewangoe hendak menegaskan bahwa umat Kristen merupakan bagian integral dari bangsa dan negara, sebab umat Kristen bukanlah penumpang gelap atau orang asing dalam suatu negara (*polis*).

Dalam rangka mengejawantahkan visi umat Kristen dalam konteks Indonesia yang dijelaskan sebelumnya, Yewangoe meminjam ungkapan Johannes Leimena, “umat Kristen hendaklah menjunjung kewarganegaraan yang bertanggung jawab.” Berdasarkan pernyataan tersebut, baik Leimena maupun Yewangoe hendak menjelaskan bahwa orang Kristen memiliki dua kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Kerajaan Allah sekaligus kewarganegaraan Indonesia. Kedua kewarganegaraan itu tidak bertentangan satu dengan yang lain, justru kedua kewarganegaraan tersebut saling memperkuat identitas orang Kristen itu sendiri.⁴⁵ Kekristenan bisa memperkuat nasionalisme, sebab ajaran-ajaran Kristen mengenai persamaan dan kemerdekaan telah ikut memicu perasaan kebangsaan itu. Sebaliknya juga, nasionalisme memperkuat kekristenan.⁴⁶

⁴¹ Andreas A Yewangoe, *Civil disobedience: Pembangkangan sosial dan/atau ketidaktaatan warga negara dalam bingkai negara demokrasi* (Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2009), 73.

⁴² Andreas A Yewangoe, *Visi Kristen mengenai politik* (Waingapu: Sinode GKS, 2013), 110.

⁴³ Yewangoe, “Visi Kristen mengenai politik,” 2013, 137–39.

⁴⁴ Yewangoe, *Visi Kristen mengenai politik*, 2013, 113.

⁴⁵ Yewangoe, *Tidak ada penumpang gelap: Warga gereja, warga bangsa*, 14.

⁴⁶ Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, 19.

Semua warga negara, secara khusus orang Kristen, haruslah bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi dan berlaku di dalam negaranya, termasuk dalam hal maju dan mundurnya negara.⁴⁷ Dalam konteks yang demikian, orang Kristen dan seluruh warga negara berada dalam posisi kesederajatan, tidak ada seorang pun yang patut dikucilkan atau dianggap sebagai orang asing karena faktor suku, agama, ras, atau etnis.⁴⁸

Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Demikianlah, maka umat Kristen harus menyadari posisinya sebagai bagian integral negara. Setiap umat beragama, termasuk umat Kristen, tidak boleh mementingkan kalangannya sendiri. Persatuan dan kesatuan merupakan faktor yang penting dalam eksistensi suatu negara. Persatuan dan kesatuan itu hendaknya didasarkan pada kesadaran bukan pada paksaan.⁴⁹ Setiap orang Kristen bersama-sama dengan teman sebangsanya wajib membangun kehidupan bersama yang harmonis dan penuh kerukunan.⁵⁰

Pendeta dan Politik

Bagaimana posisi seorang pendeta dalam pemikiran teologi politik Yewangoe? Menurutnya, pendeta tidak bisa dilepaskan dari label “wakil Allah” di dunia.⁵¹ Bila politik dipahami sebagai kemampuan untuk hidup bersama dalam satu *polis*, maka pendeta dan gereja jelas harus berpolitik dalam rangka mewujudkan masyarakat *polis* yang adil dan sejahtera, atau lebih tepat ikut serta mewujudkan *civil society*.⁵² Permasalahan muncul apabila pendeta dikaitkan dengan politik dalam matra kedua, yaitu kekuasaan.

Bolehkah pendeta ikut serta dalam politik (praktis) dalam matra kekuasaan? Ada beberapa pertimbangan dalam level pilihan pribadi yang harus disiapkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, seorang pendeta harus benar-benar mempertimbangkan apakah keputusan atau sikapnya untuk masuk ke dalam politik praktis akan mendatangkan kebaikan atau justru menimbulkan hal-hal negatif dalam lingkup gereja atau jemaatnya.⁵³ Kedua, seorang pendeta harus mempertimbangkan situasi dan “kedewasaan” jemaat untuk menanggapi sikap atau keputusan tersebut. Artinya, pendeta harus mempertimbangkan apakah jemaat merasa terganggu atau justru mendukung keputusan tersebut.

Apabila seorang pendeta memang mengambil sikap untuk masuk dalam politik praktis, maka mimbar tidak boleh dipergunakan demi kepentingan politik, agar supaya mimbar tidak disalahgunakan untuk mengkampanyekan program-program politiknya.⁵⁴ Seorang pendeta harus mampu menempatkan diri sebagai seorang politisi di satu sisi dan pendeta di sisi yang lain. Dengan demikian, seorang pendeta juga tidak boleh mengabaikan tugas pastoralnya. Karena itu, lebih bijak apabila seorang pendeta untuk sementara waktu menonaktifkan diri dari jabatan kependetaan. Langkah ini perlu diambil agar pekerjaan dalam jemaat tidak terbelengkalai, dan gereja bisa mempersiapkan seorang pendeta lain untuk menangani tugas-

⁴⁷ Andreas A Yewangoe, *Iman, Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 186.

⁴⁸ *Ibid.*, 187.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Yewangoe dan Sairin, *Suara-suara menyeruak udara: Serpihan-serpihan pemikiran dipusaran kehidupan kekinian*, 67.

⁵¹ Yewangoe, *Tidak ada negara agama: Satu nusa, satu bangsa*, 239.

⁵² Andreas A Yewangoe, *Civil Society di Tengah Agama-Agama* (Jakarta: Bidang Koinonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2009), 45–46.

⁵³ Yewangoe, *Tidak ada negara agama: Satu nusa, satu bangsa*, 240.

⁵⁴ *Ibid.*

tugas tersebut.⁵⁵ Idealnya, apabila seruan politis yang dikeluarkan oleh si pendeta esensinya tidak bertentangan dan justru menunjang atau mengafirmasi seruan teologis yang profetik, maka seruan tersebut tidak boleh ditanggapi negatif. Namun, apabila seruan politik yang disampaikan mengarah pada kepentingan pribadi dan bertolak belakang dengan seruan teologis-profetik, maka gereja dan jemaat perlu mengkritisi aksi serta seruan pendeta tersebut, dan apabila dirasa telah melewati batas aturan gereja, maka si pendeta bisa saja diberi sanksi gereja.

Kontribusi Pemikiran Yewangoe

Pemikiran Yewangoe memberi suatu tawaran bahwa politik bukan suatu hal yang tabu dan yang perlu di jauhi, apalagi ditolak keberadaannya. Menurut Yewangoe, ada sejumlah *entry point* teologis yang bisa menjadi basis keterlibatan gereja dalam dunia politik. Selain itu, Yewangoe merumuskan visi politik-teologis yang idealnya harus dimiliki bersama oleh gereja-gereja atau umat Kristen di Indonesia. Keunikan lainnya dari gagasan Yewangoe ada-lah politik yang diartikan dalam dua matra, serta relasi antara kedua matra tersebut. Lewat teori dua matra politiknya, Yewangoe menawarkan suatu rumusan tentang politik yang mengisyaratkan bahwa kemauan bersama untuk membangun serta memelihara polis tidak bertolak belakang dengan eksistensi kekuasaan yang berwujud dalam bentuk pemerintah. Pemikiran Yewangoe hendak mengajak masyarakat Indonesia, khususnya komunitas Kristen, untuk menyadari bahwa kekuasaan diperlukan untuk membangun dan memelihara *polis*. Dengan kata lain, perlu adanya penegasan bahwa kekuasaan merupakan konsekuensi dari tujuan untuk membangun dan memelihara *polis* itu sendiri. Bisa juga dipahami bahwa matra kedua merupakan konsekuensi dari adanya matra pertama. Jika masyarakat sudah mampu mengelola *polis* secara mandiri, maka kekuasaan yang menubuh dalam diri pemerintah tidak diperlukan lagi. Namun pada kenyataannya, masyarakat belum bisa membangun dan memelihara *polis* secara mandiri karena ada begitu banyak kepentingan masyarakat yang saling bertolak belakang. Dengan demikian, kekuasaan yang mewujud dalam diri pemerintah jelas tetap diperlukan.

Pemikiran Yewangoe bisa diarahkan kepada pemerintah untuk dijadikan fungsi kontrol atas penggunaan kekuasaannya. Kekuasaan pada dirinya sendiri harus dilihat sebagai sesuatu hal yang positif, sebab yang negatif adalah oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Kekuasaan harusnya dipersepsikan sebagai dasar sekaligus tujuan dari kebaikan bersama (*common good; bonum commune*). Christine Hinze dalam bukunya *Comprehending power in Christian social ethics*, menyatakan bahwa baik kekuasaan yang mendominasi (*power-over* atau *superordination*) maupun kekuasaan yang memiliki kapasitas untuk mentransformasi (*power-to* atau *transformative capacity/effective capacity*) berpusat pada kebaikan bersama (*common good*).⁵⁶ Dengan kata lain, bagaimanapun bentuk kekuasaan yang berwujud dalam bentuk pemerintah, idealnya ia hadir demi kebaikan bersama suatu *polis*. Dominasi dan pengaruh dari kekuasaan untuk melakukan transformasi haruslah diarahkan kepada kebaikan bersama, sebagai perwujudan “kemauan bersama untuk membangun dan memelihara *polis*.” Apabila kedua matra politik yang dikemukakan oleh Yewangoe itu berdiri atau ditempatkan sendiri-sendiri, maka politik akan kacau balau.

Dengan menawarkan arti politik sebagai kemauan bersama dari seluruh anggota *polis* untuk saling memelihara dan memberdayakan, Yewangoe ingin menegaskan bahwa politik

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Christine Firer Hinze, *Comprehending Power in Christian Social Ethics* (Atlanta: Scholar Press, 1995), 287.

tidak bisa dihindari oleh siapapun, sebab di dalam diri setiap orang memiliki dimensi politik atau dengan kata lain setiap orang adalah anggota dari suatu *polis*. Hal tersebut juga pernah dinyatakan oleh Philip Wogaman dalam bukunya *Christian perspective on politics*. Menurut Wogaman, setiap orang tidak bisa melepaskan diri dari politik, karena bagaimanapun eksistensi dan aktivitas manusia pasti akan selalu mempunyai implikasi politik, yang sekaligus juga dipengaruhi atau dikendalikan oleh kekuatan politis. Kebijakan politik bisa menentukan nasib dan kehidupan suatu negara beserta masyarakat di dalamnya. Kebijakan politik menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, menentukan hak dan kewajiban masyarakat, menentukan kebijakan kepemilikan dan perdagangan, menentukan apakah negara ikut berperang atau tidak, bahkan bisa menentukan kebebasan untuk beribadah, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Dengan kata lain, politik bisa menentukan kemajuan dan kesejahteraan suatu negara beserta rakyatnya.⁵⁷ Lewat perspektif yang demikian, baik Yewangoe maupun Wogaman ingin menegaskan bahwa politik merupakan sarana untuk memfasilitasi dan mengondisikan terwujudnya *polis* sebagai suatu tempat bagi semua orang yang berada di dalamnya untuk saling memelihara dan memberdayakan, tetapi juga bisa terjadi sebaliknya. Untuk itulah, maka gereja tidak boleh menutup mata terhadap permasalahan politik yang terjadi.

Kritik atas Pemikiran Yewangoe

Rumusan pemikiran Yewangoe terkait keterlibatan pendeta dalam politik praktis terkadang bisa membingungkan pembaca karya tulisnya, sebab pada satu sisi ia mengisyaratkan agar pendeta harus menonaktifkan diri dari tugas kependetaan ketika memasuki pentas politik, namun pada sisi yang lain ia juga menyatakan bahwa tugas politik adalah suatu panggilan gereja, sehingga jangan sampai keterlibatan seorang pendeta dalam politik lalu dianggap sebagai sebuah penyimpangan yang harus diberi sanksi.⁵⁸ Menurut hemat saya, Yewangoe mengambil sikap untuk tetap membiarkan kedua sikap tersebut ada untuk dijadikan acuan dialektis. Dengan kata lain, kita tidak dapat melihat adanya sikap, kesimpulan, atau pendirian yang tunggal dari rumusan pemikiran Yewangoe terkait keterlibatan pendeta dalam urusan politik.

Keterlibatan pendeta dalam politik tidak boleh langsung diasumsikan sebagai aksi yang negatif. Pada dasarnya, panggilan iman yang dihayati oleh seorang pendeta dan seluruh orang Kristen tidaklah berbeda, semua pengikut Kristus memiliki keprihatinan yang sama, yaitu menyampaikan dan mengusahakan keselamatan yang dianugerahkan oleh Kristus. Itulah inti pekabaran Injil. Dengan latar disiplin ilmu teologi yang dipelajari oleh seorang pendeta, maka idealnya seorang pendeta cenderung lebih memahami berbagai inti pengajaran Kristen dibanding warga gereja yang tidak mengenyam studi teologi secara formal. Namun, memahami saja tidak cukup. Setiap ilmu dan juga iman perlu diaplikasikan dalam aksi yang kongkret. Sebab, teori, refleksi, bahkan rumusan teologis yang luar biasa sekalipun, tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat tanpa adanya suatu aksi. Pada titik ini, apa yang dikatakan oleh Karl Marx benar, bahwa yang paling penting bukan menginterpretasikan realitas, melainkan merubadiah atau mentransformasinya.⁵⁹ Inilah tugas

⁵⁷ Philip Wogaman, *Christian perspective on politics* (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000), 7.

⁵⁸ Andreas A Yewangoe, "Pendeta dan politik," dalam *Yesus dan politik*, ed. oleh Mianto Nugroho Agung (Jakarta: Komunitas Nisita, t.t.), 23.

⁵⁹ Stefano Giacchetti Ludovisi, ed., *Critical theory and the challenge of praxis: Beyond reification* (Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2015), 1.

orang Kristen, termasuk seorang pendeta, yaitu melakukan aksi transformasi. Karena seorang pendeta adalah pribadi yang cenderung lebih memahami inti pengajaran Kristen di bandingkan orang Kristen pada umumnya, maka seharusnya seorang pendeta menjadi pribadi yang paling terbebani untuk mengaktualkan pengetahuan dan iman yang ia miliki.

Dengan memiliki latar belakang disiplin ilmu teologi, seorang pendeta dituntut untuk mampu berteologi dalam semua konteks. Sebab, jangkauan ilmu teologi tidak terbatas jangkauannya. Teologi selalu berusaha untuk menyatakan atau merefleksikan kehadiran dan kehendak Allah dalam segala konteks. Dengan demikian, tugas seorang pendeta tidaklah mudah, sebab ia harus bisa memberi respons teologis kapanpun dan di manapun. Demikian juga dalam dunia politik. Dengan membawa perspektif iman Kristen yang menekankan keselamatan dan kesejahteraan seluruh manusia sebagai *imago Dei*, maka seorang pendeta dan seluruh orang Kristen tidak boleh berdiam diri dan membiarkan dirinya dibatasi oleh institusi maupun pihak-pihak lainnya dalam rangka memperjuangkan keselamatan bagi sebanyak mungkin orang. Politisi adalah profesi yang luhur karena ia berurusan dengan harkat hidup orang banyak. Apabila yang masuk ke dalam dunia politik adalah orang-orang yang tidak berkompoten dan hanya ingin mencari kekuasaan serta kekayaan, maka dapat berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup orang banyak. Ketika seseorang masuk dalam dunia politik, orientasinya harus jelas, sebab godaan dan tantangan di dalamnya sangat hebat. Untuk itulah, seorang pendeta bisa menjadi aktor yang signifikan untuk masuk di dalamnya. Seorang pendeta bisa memberi warna tersendiri dan diharapkan menjadi terang dalam kegelapan.

Keterlibatan seorang pendeta dalam dunia politik penekanannya bukan pada peran apa yang nantinya dapat ia lakukan di dalam dunia politik, melainkan apa yang menjadi dasar, motivasi, dan orientasi seorang pendeta untuk masuk ke dalamnya. Sebab, peran seorang politisi kurang lebih sama dalam praksisnya, seperti legislasi, menyusun anggaran belanja pemerintah (*budgeting*), fungsi kontrol (pengawasan), menjaga konstitusi agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat, mengakomodir aspirasi masyarakat, melakukan pendidikan politik, melaksanakan aksi pengabdian kepada masyarakat, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, membangun komunikasi serta hubungan baik dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang menjadi perhatian seorang pendeta adalah apa yang “mewarnai” atau mendasari dirinya ketika melakukan segala tugas dan perannya dalam dunia politik tersebut. Inilah yang membedakan kiprah seorang pendeta dan politisi pada umumnya, yaitu mengejawantahkan pengetahuan teologis dan panggilan imannya secara konsisten dan berintegritas. Kebebasan beragama, kerukunan antar umat beragama, kesejahteraan umat manusia, kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, bencana alam, sanitasi lingkungan, dan berbagai masalah lainnya dapat menjadi acuan teologis dalam kiprah seorang pendeta ketika menjadi seorang politisi.

Perlu ditegaskan bahwa kiprah dalam dunia politik tidak harus masuk ke dalam partai politik, walaupun itu merupakan sarana atau instrumen utamanya. Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga bentukan yang mengkaji isu-isu sosial-politik-ekonomi, kelompok studi, kerja sama dengan pers, kerja sama dengan satuan kerja (dinas) pemerintah, lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilihan umum, serta lain sebagainya, merupakan suatu keterlibatan dan kiprah dalam dunia politik. Lewat sarana, lembaga, atau organisasi tersebut, seorang pendeta bisa memperjuangkan nilai-nilai teologisnya. Seruan dari berbagai organisasi kemasyarakatan memiliki kekuatan tersendiri dalam struktur sosial-masyarakat. Melakukan lobi, mengajukan petisi, dan menyerukan aspirasi serta wacana ilmiah kepada pihak eksekutif maupun legislatif (baik secara personal maupun lembaga) yang

dilakukan lewat organisasi-organisasi tersebut merupakan suatu perjuangan politik yang konkret. Selain itu, para pendeta bisa juga memfasilitasi terjadinya kerjasama antara gereja dan lembaga penyelenggara serta pengawasan pemilihan umum. Lewat pengalaman keterlibatan seperti demikian, seorang pendeta bisa memiliki banyak acuan dalam rangka mengajarkan pendidikan politik bagi warga gerejanya.

Untuk semakin menegaskan pemaknaan positif terkait keterlibatan dalam politik, saya menambahkan pemikiran dari Eddy Kristiyanto, Robert Borrong, dan Hannah Arendt dalam bagian ini. Menurut Eddy Kristiyanto, bersikap politis adalah merupakan sakramen. Bersikap politis adalah merupakan sakramen, yakni tanda dan sarana yang mengantarkan pada pembebasan dan penyelamatan. Suatu keterlibatan (apa pun jenis dan bentuknya) yang tidak membiarkan penderitaan dunia tenggelam dalam urusan rutin harian. Suatu hal yang berbeda dengan teologi klasik yang hanya berpuas diri dengan paham spekulatif dan tidak bergerak untuk bertindak. Kegiatan keterlibatan manusia beragama sama sekali bukanlah kiprah “intelektual” yang borjuis, yang tergilagila dengan gagasannya yang cemerlang, juga bukan seluruh hingar bingar bisnis Kekristenan. Keterlibatan itu sepatutnya bertumpu pada kenangan akan Dia yang peduli pada dunia, yang dicintai-Nya secara total. Keterlibatan yang didasarkan pada ketersentuhan yang demikian itu, tentu tidak dapat netral, melainkan harus memihak. Dengan demikian, jika agama (Kekristenan) tetap tenang dan tidak perduli melihat praktik-praktik ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi, kemiskinan, dan proses pembusukan masyarakat, berarti agama itu sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri dan sama sekali tidak relevan untuk kehidupan.⁶⁰

Apa yang dikatakan oleh Kristiyanto tersebut sejalan dengan pemikiran Robert Borrong tentang sakramen. Menurut Borrong, maksud dan tujuan sakramen bukan hanya menjadi tanda dan meterai kesatuan hubungan yang baru antara kita dengan Allah, melainkan juga menjadi tanda serta meterai hubungan baru di antara sesama manusia dan semua ciptaan.⁶¹ Dengan pengertian yang demikian, politik menjadi suatu tanda yang kelihatan atau medan perjumpaan yang memungkinkan terwujudnya keselamatan dan restorasi hubungan antara manusia, seluruh ciptaan, dan Allah. Dengan demikian, pemahaman politik Kristen sebagai suatu sakramen mengindikasikan adanya suatu kesadaran dan kemauan untuk selalu terhubung dengan seluruh ciptaan dalam suatu relasi persekutuan yang memperjuangkan terwujudnya kebaikan bersama antar seluruh ciptaan, sebagaimana Allah yang mau untuk terus mencintai dan menyelamatkan seluruh ciptaan beserta alam semesta.

Menurut hemat saya, memasuki dunia politik praktis berarti suatu pemberian diri, pengorbanan, dan pengabdian. Suatu kesediaan untuk memangkas *self-centeredness* atau hak pribadi, dan keluar dari zona nyaman. Oleh sebab itu, menurut Hannah Arendt, keadilan, kebenaran, dan keutamaan politik selalu merupakan pengalaman bertindak di hadapan publik. dan bukanlah suatu pengalaman soliter di ruang privat.⁶² Idealnya, politik dibangun dan dikerjakan untuk memperjuangkan kebaikan umum bersama (*bonnum commune communitatis*). Perjuangan politik, dengan demikian, adalah semata-mata juga agar semua menjadi satu adanya (*ut omnes unum sint*).⁶³ Politik yang murni adalah pemberian diri bagi orang lain, bagi sebanyak mungkin orang, dan jika memungkinkan bagi semua orang dan seluruh ciptaan.

⁶⁰ Eddy Kristiyanto, *Sakramen politik: Mempertanggungjawabkan memoria* (Yogyakarta: Lamalera, 2008), 99–100.

⁶¹ Robert Borrong, *Etika bumi baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 212.

⁶² Imran Hasibuan, ed., *Politik itu suci: Pemikiran dan praktik politik Sabam Sirait* (Jakarta: Q Communication, 2013), 16.

⁶³ Hasibuan, 23.

Bagi seluruh ciptaan, artinya politik bukan saja hanya berurusan dengan pelestarian manusia tetapi juga bagi seluruh makhluk dan alam ciptaan. Oleh sebab itulah, perlu adanya perubahan paradigma yang mengakui bahwa tugas politik berarti melakukan pelayanan atau pengabdian yang berbarengan dengan pengorbanan, dan bukanlah semata-mata demi suatu kekuasaan belaka. Dalam perspektif yang demikian, maka aktor politik bukanlah penguasa, melainkan pelayan.

Johanes Calvin pernah menyatakan bahwa politisi adalah tugas yang sakral, bahkan yang paling mulia, yang melebihi profesi pendeta sekalipun. Sebab, ia bersentuhan langsung dengan kelangsungan hidup orang banyak. Bagi Calvin, seseorang yang berani terjun ke dunia politik berarti ia berani menyanggah tugas ilahi untuk memancarkan terang di tempat yang gelap, kiprahnya tersebut merupakan suatu sikap dan tindakan yang penuh keluhuran.⁶⁴ Politisi adalah suatu pekerjaan yang luhur dan sakral, sebab politik adalah salah satu cara atau jalan untuk menolong sebanyak mungkin orang.⁶⁵ Mengutip pernyataan Sabam Sirait: “politik itu bisa menjadi kotor, itu betul. Akan tetapi, jika dalam politik sudah bersih semua, mengapa kita harus pergi melayani dan bersaksi di sana? Justru karena banyak tantangan dalam politik untuk membuatnya menjadi kotor, maka kita harus melayani dan bersaksi di sana.”⁶⁶

Kesimpulan

Politik tidak memiliki suatu definisi yang tunggal dan objektif. Dalam konteks Indonesia, rumusan Yewangoe bisa dijadikan referensi yang komprehensif untuk digunakan dalam rangka mengartikan politik dan hubungannya dengan gereja. Injil merupakan basis atau *entry point* bagi keterlibatan gereja dalam dunia politik. Keterlibatan gereja dalam dunia politik adalah suatu panggilan, dan bukanlah sesuatu yang fakultatif. Politik dan gereja bukanlah suatu entitas yang saling bertolak belakang. Baik gereja maupun politik memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh manusia dan keutuhan ciptaan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita itu, maka gereja tidak bisa menutup diri dari realitas yang ada di sekitarnya. Gereja harusnya menjadi aktor dalam ruang publik untuk mentransformasi kehidupan sosial-masyarakat menuju ke arah *civil society*, bekerja untuk perubahan yang konkret, mengupayakan sekaligus mempertahankan hukum yang manusiawi, serta menjaga agar institusi pemerintahan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Referensi

- Apner, Grets Janialdi. “Kehadiran Kristiani dalam politik: Rekonstruksi teologi misi tentang peran Kekristenan dalam ruang publik politis di Indonesia.” *Diegesis* 6, no. 2 (Agustus 2021): 1–23.
- Borrong, Robert. *Etika bumi baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Hasibuan, Imran, ed. *Politik itu suci: Pemikiran dan praktik politik Sabam Sirait*. Jakarta: Q Communication, 2013.
- Hertz, Karl. H. *Politics is a way of helping people: A christian perspective for times of crisis*. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1974.
- Hinze, Christine Firer. *Comprehending power in Christian social ethics*. Atlanta: Scholar Press, 1995.
- Hutahaean, Hasahatan. “Teologi politik gereja: Menemukan dan memancarkan tritugas

⁶⁴ Imran Hasibuan, ed., *Politik Itu Suci: Pemikiran dan Praktik Politik Sabam Sirait* (Jakarta: Q Communication, 2013), 3.

⁶⁵ Karl. H Hertz, *Politics is a Way of Helping People: A Christian Perspective for Times of Crisis*. (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1974), 22.

⁶⁶ Hasibuan, *Politik Itu Suci: Pemikiran dan Praktik Politik Sabam Sirait*, 3.

- gereja dalam pilkada dan pilpres." *Melo* 1, no. 1 (Juni 2021): 1–17.
- Kristiyanto, Eddy. *Sakramen politik: Mempertanggungjawabkan memoria*. Yogyakarta: Lamalera, 2008.
- Ludovisi, Stefano Giacchetti, ed. *Critical theory and the challenge of praxis: Beyond reification*. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2015.
- Madani, Mohamad Amin. "Pelantikan UKP PIP." *Republika Online*, 7 Juni 2017. <https://visual.republika.co.id/berita/or678g283/pelantikan-ukp-pip>.
- Pakpahan, Jordan. "Politik keadilan: Peran politik gereja di masa kini." *Loko Kada* 2, no. 2 (September 2022): 92–101.
- "Profil BPIP: Sejarah, Tugas, Fungsi, Dasar Hukum Pembentukan." Diakses 21 September 2023. <https://tirto.id/profil-bpip-sejarah-tugas-fungsi-dasar-hukum-pembentukan-gGfX>.
- Sinaga, Martin Lukito, dan Nelman A Weny. "Mengenal Lebih Jauh Andreas A. Yewangoe." *Satu Harapan*, 8 Juni 2018. <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/mengenal-lebih-jauh-andreas-a-yewangoe>.
- Tokoh Indonesia. "Andreas A Yewangoe," 3 Maret 2005. <https://tokoh.id/tokoh/ensiklopedi/andreas-a-yewangoe/>.
- Tokoh Indonesia. "Pelayan Gereja bagi Orang Lain," 3 Maret 2005. <https://tokoh.id/biografi/1-ensiklopedi/pelayan-gereja-bagi-orang-lain/>.
- Wogaman, Philip. *Christian perspective on politics*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000.
- Yewangoe, Andreas A. *Agama dan kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia., 2001.
- — —. *Civil disobedience: Pembangkangan sosial dan/atau ketidaktaatan warga negara dalam bingkai negara demokrasi*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2009.
- — —. *Civil society di tengah agama-agama*. Jakarta: Bidang Koinonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2009.
- — —. "Hubungan gereja dan negara di Indonesia." Dalam *Ecclesia reformata semper reformanda: Dua belas tulisan mengenai Calvin dan Calvinisme*, disunting oleh Agustinus M.L Batlajery dan Thomas Van den End. Jakarta: Gunung Mulia, 2014.
- — —. *Iman, agama dan masyarakat dalam negara pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- — —. "Pendeta dan politik." Dalam *Yesus dan politik*, disunting oleh Mianto Nugroho Agung. Jakarta: Komunitas Nisita, t.t.
- — —. *Theologia crucis di Asia: Pandangan-pandangan orang Kristen Asia mengenai penderitaan dalam kemiskinan dan keberagaman di Asia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.
- — —. *Tidak ada ghetto: Gereja di dalam dunia*. Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI & BPK Gunung Mulia, 2009.
- — —. *Tidak ada negara agama: Satu nusa, satu bangsa*. Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI & BPK Gunung Mulia, 2009.
- — —. *Tidak ada penumpang gelap: Warga gereja, warga bangsa*. Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI & BPK Gunung Mulia, 2009.
- — —. "Visi Kristen mengenai politik." Dalam *Teologi politik: panggilan gereja di bidang politik pascaorde baru*, disunting oleh Zakaria J. Ngelow (Eds.). Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013.
- — —. *Visi Kristen mengenai politik*. Waingapu: Sinode GKS, 2013.
- Yewangoe, Andreas A, dan Wenata Sairin. *Suara-suara menyeruak udara: Serpihan-serpihan pemikiran dipusaran kehidupan kekinian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.